

## BAB II

### DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI IRAN

Kebijakan luar negeri Iran merupakan produk pelbagai kepentingan antar-elemen yang kadang bersaing, yaitu antara kepentingan nasional, persepsi para pemimpin bahwa Iran terancam, serta interaksi rezim dengan pelbagai faksi dan konstituen, menurut Kenneth Katzman dalam *Iran's Foreign and Defense Policies*. (Tirto, 13 Januari 2018)

Berdasarkan perjalanan sejarah modern Iran, Revolusi Islam Iran tahun 1979 menandakan berubahnya haluan politik dan sistem pemerintahan yang dianut Iran. Hal ini berpengaruh besar terhadap landasan dan orientasi kebijakan luar negeri Iran. Dalam mengambil kebijakan luar negeri, Iran mengacu pada undang-undang dasar negaranya. Iran memiliki prinsip utama yang membentuk konsep kebijakan luar negerinya, yaitu menolak segala bentuk dominasi dari pihak asing, mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan teritorial Iran, membela hak-hak seluruh seluruh umat muslim, tidak bersekutu dengan kekuatan hegemoni, dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang menjaga perdamaian. (Ramazani, 2012, p. 9).

Pasal paling relevan dengan kebijakan luar negeri yang tertuang dalam konstitusi Iran adalah Pasal 3 dan Pasal 152, dimana kebijakan luar negeri Iran harus sesuai dengan ideologi Islam. Konstitusi Iran tidak banyak memberikan panduan khusus dalam distribusi kekuasaan terkait kebijakan luar negeri. Pada Pasal 110, digambarkan bahwa tokoh terpenting dalam kebijakan luar negeri adalah Pemimpin Tertinggi. Dimana pemimpin tertinggi memiliki kekuatan untuk menyatakan perang atau perdamaian. (Rieffer-Flanagan, 2009, p. 9)

## **A. Kebijakan Luar Negeri Iran sebelum Era Hassan Rouhani**

Pasca Revolusi Iran yang mengakhiri 2.500 tahun kekaisaran Persia, kepemimpinan tertinggi Iran dipegang oleh Khomeini. Sejak saat itu, Iran mengalami perubahan sistem dan kebijakan secara menyeluruh. Kebijakan luar negeri Iran di masa Khomeini memiliki dua tujuan utama yaitu menjadikan Iran sebagai negara yang tidak memihak barat atau Timur (*Neither West nor East but Islamic Republic*) serta kebijakan ekspor revolusi Iran (*Export the Revolution*). Tujuan ini menjadi dasar sikap politik luar negeri Iran di masa perang dingin. Menurut beberapa pengamat kebijakan luar negeri Iran, kebijakan *Neither West nor East but Islamic Republic* dianggap sebagai usaha Iran menjembatani hubungan luar negerinya dengan seluruh negara baik di Barat maupun Timur. (Rakel, 2008, p. 148) Selain itu, kebijakan ekspor revolusi diimplementasikan dalam tingkat internasional melalui dukungan Iran terhadap perlawanan atas nama Islam di negara-negara dunia ketiga. Sikap tersebut didasari atas semangat Iran melawan pengaruh Barat.

Sejak masa kepemimpinan Khomeini hingga masa kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad, Iran cenderung statis dalam kebijakan luar negerinya yang melekat dengan prinsip keamanan nasional. Meskipun pada beberapa masa kepemimpinan, seperti pada era Rafsanjani, terdapat upaya untuk lebih terbuka dengan dunia internasional, khususnya Amerika Serikat, namun hal tersebut belum membawa banyak perubahan untuk Iran. (Sariolghalam, 2018).

## 1. Kebijakan dan Sengketa Nuklir Iran

Program nuklir dan sengketanya merupakan ciri khas atau isu utama dari kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Iran. Sengketa nuklir Iran awalnya merupakan buah dari persetujuan antara Iran dengan Amerika Serikat yang muncul pasca penggulingan Shah Reza Pahlevi pada 1979. Dimana sebelumnya Iran dibawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat termasuk dalam hal pengembangan program nuklir Iran. Pada awal 1957, Amerika Serikat meluncurkan program nuklir dengan Iran. Iran pun mengembangkan program nuklirnya pada 1970-an atas dukungan Amerika Serikat.

Namun setelah Revolusi Iran 1979, Amerika Serikat berhenti memberikan dukungan kepada Iran. Kemudian Iran terus mengembangkan tenaga nuklir yang mereka klaim untuk dijadikan sebagai tenaga pembangkit listrik. Amerika Serikat menilai bahwa negara tersebut belum perlu mengganti tenaga listriknya dengan nuklir. Negara-negara Barat pun turut curiga bahwa pengembangan nuklir di Iran bertujuan untuk membuat senjata nuklir dan negara-negara Barat pun mulai menghentikan kerjasamanya dengan Iran. kemudian Iran mulai mencari mitra kerja baru dan mulai bekerjasama dengan negara lainnya untuk melanjutkan program nuklir tersebut. Namun kerjasama baru yang akan dijalin dibatalkan oleh negara-negara yang menjadi mitra baru Iran karena kuatnya tekanan dari AS dan negara-negara Barat. (Alcaff, 2008, pp. 94-96)

Berusaha bangkit dari gagalnya berbagai kerjasama nuklir, akhirnya Iran berhasil menjalankan berbagai kerjasama dengan beberapa negara seperti Rusia, Cina, dan Pakistan terkait pengembangan program nuklirnya. Tahun 1987, Iran dan Pakistan menandatangani sebuah kesepakatan kerja sama nuklir jangka panjang dan siap membantu melatih teknisi nuklir Iran. (Joseph Cirincione, 2005, p. 303) Kemudian pada masa pemerintahan Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Awal 1990 Cina menyetujui dan menyanggupi kerja sama dalam melatih teknisi nuklir Iran dan bersedia untuk menyediakan miniatur reaktor neutron serta dua pembangkit reaktor Qinshan. (Joseph Cirincione, 2005, p. 303) Pada 1991, Cina juga mengirimkan beberapa jenis uranium ke Iran untuk dipakai dalam proses pengayaan bahan nuklir. (Simanjuntak, 2007, p. 40)

Iran juga menjalin kerjasama dengan Rusia pada 1991, dimana Rusia dan Iran menandatangani sebuah kesepakatan hubungan ekonomi yang menyatakan bahwa Rusia akan membantu membangun dua reaktor nuklir. Selanjutnya diadakan penandatanganan kesepakatan kerja sama nuklir untuk melanjutkan pembangunan reaktor Bushehr pada Agustus 1992 serta diikuti dengan realisasi kesepakatan tersebut pada Januari tahun 1995. (IISS, 2005, p. 13)

Saat pergantian era Rafsanjani menuju era Mohammad Khatami, Iran terus melanjutkan program nuklirnya. Iran bersikap kooperatif sejak tahun 2002 dengan bersedia diawasi setiap perkembangan program pengembangan nuklirnya oleh IAEA. (Simanjuntak, 2007, p. 41) Namun Iran dituduh masih menutupi sebagian aktifitas nuklirnya. Pada Juni 2003 IAEA untuk pertama kalinya mengumumkan secara terbuka bahwa Iran telah gagal melaporkan bahan-bahan dan aktivitas nuklirnya dan meminta kepada pemerintah Iran untuk bersikap kooperatif terhadap laporan yang dibutuhkan IAEA. Pada periode ini, IAEA semakin intensif mengawasi dan memberikan laporan mengenai perkembangan nuklir Iran kepada Dewan Keamanan PBB. Iran pun setuju dan menandatangani protokol tambahan, yang memungkinkan pemeriksaan lebih mendalam atas fasilitas nuklir Iran dan bersedia menghentikan sementara aktifitas konvensi dan pengayaan uraniumnya pada Oktober 2003. (IAEA, 2003)

Perkembangan program nuklir Iran semakin meningkat pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad yang menjabat sejak 2005 hingga 2013. Pada masa Ahmadinejad Iran melakukan pengayaan uranium mencapai 20%. Hal ini dianggap melanggar kesepakatan Non-Proliferasi Nuklir yang pernah ditandatangani Iran pada 1 Juli 1968. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa seharusnya setiap negara hanya memiliki 5% dari pengayaan uranium untuk bahan dasar tenaga nuklir. Pada tahun 2006, IAEA kembali melakukan inspeksi kepada Iran. Dari hasil inspeksi tersebut Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi mengenai program nuklir Iran. (Kasmin, 2015, p. 158) Ahmadinejad pun hingga akhir masa jabatannya terus menolak untuk menyetujui perjanjian nuklir yang dinegosiasikan

oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Dikeluarkannya resolusi DK PBB pada tahun 2006 dan 2007, yang disahkan dengan suara bulat, termasuk Rusia dan Tiongkok menyetujui, membuat Iran secara resmi mendapat sanksi PBB. Resolusi selanjutnya pada tahun 2008 disahkan dengan 14 negara anggota DK-PBB yang mendukung. Resolusi ini memperluas sanksi yang dikenakan terhadap Iran setelah resolusi sebelumnya dikeluarkan pada 3 Maret 2008, yaitu bahwa Dewan Keamanan antara lain menambah embargo persenjataan dan sanksi di bidang perbankan, serta melarang Iran melakukan kegiatan di luar negeri yang sensitif seperti penambangan, produksi atau penggunaan bahan-bahan serta teknologi uranium. PBB meminta semua negara untuk tidak memasok, menjual, atau mengirim tank-tank perang, kendaraan tempur bersenjata, sistem artileri kaliber tinggi, pesawat tempur, helikopter penyerang, kapal perang, dan sistem peluru kendali kepada Iran. Butir lain resolusi adalah meminta negara-negara untuk melakukan transfer atau bantuan teknologi peluru kendali balistik untuk senjata nuklir dan meminta negara-negara untuk memeriksa kapal-kapal laut Iran yang diduga mengangkut barang-barang terlarang dari Iran. (Kompas, 10 Juni 2010)

## 2. Look to The East

Di tengah serangkaian sanksi yang diberikan kepada Iran, Ahmadinejad kemudian mengambil kebijakan *Look to The East*. Kebijakan ini merupakan orientasi politik luar negeri Iran untuk berkiblat ke dunia Timur. Ahmadinejad percaya hubungan luar negeri dengan negara-negara non-Barat yang bisa menerima semangat revolusi Iran dapat menjadi alternatif lain untuk mengimbangi dominasi Barat. (Amuzegar, 2005, p. 49) Berbagai tekanan Amerika

Serikat kepada Iran dan argumentasi Ahmadinejad yang meyakini bahwa negara Barat tidak pernah sepaham dengan Iran tentunya berpengaruh pada kebijakan luar negeri Iran. Sehingga pada masa kepemimpinannya, isu keamanan menjadi fokus Iran. Terlebih lagi melihat kondisi Timur Tengah, termasuk adanya invasi Amerika Serikat terhadap Afganistan dan Irak, menjadikan Iran merasa perlu meningkatkan keamanan nasionalnya.. (Haji-Yousefi, 2010, p. 8)

Sebagai bentuk kebijakan *Look to The East*, Iran mulai menunjukkan keinginannya bergabung dengan Organisasi Internasional non-Barat yaitu *Shanghai Cooperation Organisaion* (SCO). SCO merupakan reinkarnasi dari *Shanghai Five* yang didirikan pada tahun 1996 oleh lima negara yaitu Cina, Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, dan Tajikistan. Organisasi yang pada awalnya dibentuk untuk meminimalisir konflik perbatasan antar negara dan bertransformasi menjadi organisasi kerjasama yang tidak hanya fokus pada stabilitas regional tetapi juga kerjasama ekonomi dan budaya.

Iran untuk pertama kalinya bergabung dengan SCO pada tahun 2005 dengan status negara pengamat atau *observer country*. Dengan diterimanya Iran sebagai pengamat SCO, dan partisipasinya mendapat respon baik dari negara-negara anggota SCO, Iran kemudian mencoba untuk melangkah menjadi anggota tetap atau *full membership* di SCO. Antusiasme Iran untuk mendapatkan keanggotaan tetap SCO diekspresikan oleh Ahmadinejad melalui pidatonya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SCO pada 15 Juni 2006, bahwa Iran akan bekerja dengan SCO untuk mengembangkan pengaruh yang kuat di dalam organisasi, dalam politik regional dan internasional, melayani dan membendung ancaman dan pelanggaran hukum dari berbagai negara (CBC News, 15 Juni 2006). Mengingat kondisi Iran yang saat itu menuai

pro dan kontra akibat sengketa nuklirnya, banyak pakar yang menilai pidato Ahmadinejad tersebut secara terang-terangan menggambarkan SCO sebagai organisasi keamanan anti-Barat yang diharapkan dapat membendung hegemoni Barat. (Unver Noi, 2006) Hingga pada tahun 2008 Iran secara resmi mendaftarkan negaranya sebagai anggota tetap melalui prosedur formal yang ditetapkan SCO. (Khodae M. A., 2013, p. 188)

Mendaftarnya Iran sebagai calon anggota tetap mendapatkan berbagai respon, terlebih lagi terdapat dugaan bahwa masuknya Iran ke dalam SCO merupakan strategi untuk melawan Amerika Serikat. Keinginan Iran untuk menjadi anggota tetap rupanya tersandung peraturan yang dikeluarkan SCO terkait syarat negara anggota tetap. Pada tahun 2010 SCO mengumumkan bahwa peraturan untuk mendapatkan keanggotaan penuh harus berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan SCO antara lain yakni; pertama, negara yang menginginkan bergabung dengan SCO merupakan negara yang berada di wilayah Eurasia dan memiliki hubungan diplomatik dengan semua negara anggota SCO, termasuk juga dengan negara pengamat maupun partner dialog. Kedua, secara aktif mendukung kerjasama ekonomi, perdagangan dan budaya dengan negara anggota SCO, dan ketiga negara tersebut sedang tidak berada dibawah sanksi Internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Lukin, 2015)

Pada poin ketiga yang menyatakan bahwa negara yang ingin menjadi anggota tetap SCO adalah negara yang sedang tidak berada dibawah sanksi internasional, dan kriteria ini secara otomatis menggagalkan Iran untuk menjadi anggota tetap SCO. Sehingga Sanksi internasional yang sedang dijalani Iran menjadi batu sandungan bagi Iran untuk menjadi anggota tetap SCO kedepannya.

## **B. Kebijakan Luar Negeri Hassan Rouhani**

Sebelum menjadi presiden Iran, Hassan Rouhani pernah menjabat sebagai Sekertaris Dewan Keamanan Nasional Agung pada era presiden Khatami, yaitu sejak tahun 1989 hingga 2005. Rouhani juga merupakan Wakil Pemimpin Tertinggi Dewan Keamanan Nasional selama 24 tahun, yaitu pada 1989 hingga 2013. Rouhani yang berasal dari kalangan reformis ini mulai menjabat sebagai Presiden pada tanggal 3 Agustus 2013 dan kembali terpilih menjadi presiden pada 2017.

Pada masa kepemimpinannya, Rouhani menjanjikan akan memperbaiki kondisi ekonomi dan politik Iran. Terkait kebijakan luar negeri Iran, menurutnya kebijakan pemerintah Iran terhadap hubungan luar negeri didasarkan pada moderasi. Sehingga Iran tidak tunduk dan tidak juga kompromis dengan negara lain. Namun Iran tidak bersikap pasif ataupun konfrontatif dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Rouhani berupaya untuk membangun intraksi konstruktif dan menggunakan kesajajaran martabat, kebijaksanaan, serta sikap saling menghormati dalam menjalin hubungan dengan negara lain. (Rmol.co, 12 Februari 2014) Orientasi kebijakan luar negeri Rouhani diimplementasikan antara lain melalui perjanjian nuklir Iran dan keseriusannya bergabung dengan SCO sebagai anggota tetap.

### **1. Perjanjian Nuklir Iran**

Babak baru terkait kebijakan dan sengketa nuklir Iran dimulai sejak Rouhani menggantikan Ahmadinejad sebagai presiden Iran. Perubahan kebijakan luar negeri yang paling menonjol dari masa Ahmadinejad ke masa pemerintahan Hassan Rouhani adalah tercapainya kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA). JCPOA merupakan kesepakatan yang dijalin antara 5 negara anggota tetap

Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Cina, dan Uni Eropa yang diwakili oleh Jerman, atau disebut juga dengan P5 + 1. Sebelumnya upaya negosiasi terkait program pengembangan teknologi nuklir Iran oleh negara-negara P5+1 mengalami penolakan di masa pemerintahan Ahmadinejad. Hingga pada akhirnya setelah melakukan beberapa kali pertemuan dan bernegosiasi, pada 14 Juli 2015 JCPOA secara resmi ditandatangani. Salah satu faktor pendorong kesepakatan ini mampu dicapai dikarenakan semakin membaiknya hubungan Iran di era Rouhani dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama.

Pada dasarnya, kesepakatan JCPOA yang disepakati oleh Iran dan P5+1 tersebut merupakan suatu kesepakatan timbal balik. Iran menyepakati JCPOA supaya P5+1 mencabut serangkaian sanksi yang diberikan kepada Iran dengan imbalan pembatasan terhadap ruang lingkup dan tingkat kegiatan pengayaan nuklir (*nuclear enrichment*) serta kapasitas dan lokasi fasilitas pengayaannya. Isi kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Iran harus menghentikan pembangunan reaktor di Arak dan tidak melakukan pemrosesan bahan bakar nuklir bekas dan membangun fasilitas baru. Selain itu, Iran juga dituntut agar lebih transparan terkait aktifitas nuklirnya dan meratifikasi serta menerapkan Protokol Tambahan.

Seperti yang disebutkan dalam JCPOA, jika Iran telah berhasil melaksanakan hal-hal tersebut, maka program nuklir Iran akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti negara anggota lainnya yang juga terikat dalam Perjanjian Non-Poliferasi nuklir. Secara keseluruhan, JCPOA mencakup penempatan batasan pada program nuklir Iran dan juga ketentuan pemantauan yang dirancang untuk mendeteksi usaha

Iran dalam memproduksi senjata nuklir menggunakan fasilitas, baik yang terdaftar maupun yang tidak. (Katzman, 2016, pp. 7-9)

Noemi M. Rocca, peneliti pada *International Politics and Conflict Resolution* dari Universitas Coimbra, Portugal, menyebut bahwa kesepakatan nuklir itu benar-benar menjadi titik balik bagi posisi Iran dalam geopolitik Timur Tengah. Sebab, setelah perjanjian ini diteken, sejumlah negara mengikuti langkah Amerika Serikat mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran. Uni Eropa, yang sebelumnya malu-malu melakukan kerja sama ekonomi dengan Iran, akhirnya secara terbuka menekan kontrak perdagangan dengan Teheran, khususnya dalam bidang migas. Pada akhir 2015, tiga perusahaan minyak dunia, Repsol, Total, dan Shell menyepakati kerja sama dagang bernilai jutaan dolar. Pada awal 2016, Jepang resmi mencabut embargo ekonomi ke Iran yang berpeluang memperbarui perjanjian dagang kedua negara, khususnya di bidang migas. Pencabutan embargo ini juga berpeluang mencairkan aset Iran senilai puluhan miliar dolar AS.

Menurut data Bank Dunia, pada 2016 Iran mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 13,4 persen alias 12,1 persen lebih tinggi dari tahun 2015. Sumbangan terbesar dari pertumbuhan ekonomi ini bersumber dari sektor industri (25%), terutama pada sektor migas yang mengalami peningkatan produksi sebanyak 62 persen. Sementara sektor industri non-migas hanya menyumbang 3,3 persen pada GDP Iran—dan itu sudah masuk hitungan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Iran pun berubah menjadi negara eksportir minyak terbesar nomor dua di kawasan Timur Tengah.

Namun, hanya berselang 3 tahun sejak penandatanganan kesepakatan nuklir Iran, pada Mei 2018 Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA di

bawah kepemimpinan Donald Trum. Padahal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menilai bahwa Iran sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertuang di JCPOA. Trump mengeluhkan kesepakatan itu hanya membatasi kegiatan nuklir Iran untuk jangka waktu tertentu dan gagal menghentikan pengembangan rudal balistik. Selain itu, menurut Trump, kesepakatan itu telah memberikan Iran rejeki nomplok hingga \$100 miliar yang dituduh digunakan Iran sebagai dana gelap untuk senjata, teror, dan penindasan di seluruh Timur Tengah. (Tirto, 9 Mei 2018) Setelah Donald Trump mengumumkan bahwa negaranya menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, Trump mengumumkan penerapan kembali sanksi terkait nuklir kepada Iran pada 6 Agustus 2018. Tindakan tersebut termasuk memberlakukan kembali sanksi terhadap sektor otomotif, perdagangan emas, logam mulia, sektor energi, transaksi minyak, lembaga keuangan asing dengan Bank Sentral Iran, dan sebagainya (Kompas.com, 7 Agustus 2018).

Keputusan Amerika Serikat ini menimbulkan berbagai reaksi baik dari Iran maupun negara-negara yang terikat dalam JCPOA.. Warga Iran juga menggelar unjuk rasa di beberapa kota untuk mengecam sanksi ekonomi Amerika Serikat tersebut. (BBC, 5 November 2018) Menanggapi keputusan Trump, Rouhani balik mengecam Amerika Serikat. Rouhani mengatakan telah melakukan komunikasi dengan Organisasi Energi Atom Iran agar siap bereaksi jika diperlukan. Rouhani pun mengancam dan mengatakan Iran dapat melanjutkan pengayaan uranium di tingkat industri tanpa batasan. Rouhani meyakini JCPOA akan tetap bertahan jika mitra negosiasi lainnya juga ikut mempertahankan kesepakatan tersebut dan menentang keputusan Amerika Serikat. (Tirto, 9 Mei 2018)

## 2. Upaya menjadi anggota tetap SCO

Keinginan Iran untuk menjadi anggota tetap SCO telah diajukan semenjak tahun 2008 yaitu pada masa kepemimpinan Ahmadinejad dan terus berlanjut sampai dengan sekarang. Sehingga upaya untuk mendapatkan posisi anggota tetap SCO masuk dalam agenda politik luar negeri Hassan Rouhani. Namun pendekatan yang dilakukan oleh Rouhani berbeda dengan Ahmadinejad, Rouhani menempatkan Iran sebagai negara yang menegosiasikan perdamaian dan keamanan regional. Sikap Iran dalam masa Rouhani dinilai tidak begitu berbahaya di mata dunia internasional dan berperilaku baik dalam pengembangan nuklirnya. Hal ini dapat memperbesar harapan penghapusan sanksi yang dijalan oleh Iran. Sehingga jalan untuk mendapat keanggotaan tetap SCO yang sebelumnya terhalang oleh syarat keanggotaan tetap bisa terbuka lebar untuk Iran.

Sehari setelah dilantik menjadi presiden Iran, pada 4 Agustus 2018 Rouhani mengunjungi Kyrgystan dan menghadiri KTT SCO sebagai kunjungan luar negeri pertamanya. Keseriusan Rouhani untuk mendapat keanggotaan penuh SCO dibuktikan dengan sikap Rouhani yang mengekspresikan keinginannya untuk mengakhiri sengketa nuklir yang melawan kekuatan global dan keinginannya untuk lebih aktif dengan negara Anggota. (Joobani, 2013) Selain itu, keterlibatannya dalam menghasilkan perjanjian nuklir Iran atau JCPOA bersama negara P5+1 juga merupakan langkah besar Rouhani. Perjanjian ini disambut baik oleh negara-negara anggota SCO sebab akses Iran akan semakin mudah. Bahkan pada KTT SCO 2017, selain meresmikan bergabungnya India dan Pakistan, pertemuan ini juga membahas akses Iran sebagai anggota penuh SCO. Negara-negara anggota menilai

bahwa saat itu telah cukup alasan untuk meninjau kembali surat permohonan keanggotaan penuh SCO dari Iran (The Voice of Vietnam, 2017). Sayangnya, sejak Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran, memunculkan kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat kembali menghalangi Iran untuk menjadi anggota tetap SCO.

Di tengah isu ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, para pemimpin Cina, Rusia dan 6 negara Asia berkumpul di Qiangdao, Cina dalam Konferensi Tingkat Tinggi SCO ke 18 yang digelar selama dua hari pada 9-10 Juni 2018. Hassan Rouhani pun turut hadir atas undangan Presiden Cina, Xi Jinping. Pada kesempatan tersebut, Rouhani menyampaikan harapannya agar masyarakat internasional, termasuk negara anggota SCO untuk memainkan peran yang positif dalam menangani isu penarikan diri Amerika Serikat. Rouhani mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota SCO termasuk Cina dan Rusia. Putin mengatakan kepada para pemimpin negara yang hadir bahwa keputusan Amerika Serikat dapat menciptakan kondisi yang tidak stabil, tetapi Rusia bertekad akan terus mendukung penerapan kesepakatan nuklir Iran. (Times of Israel, 2018) Di sela KTT SCO, Rouhani mengadakan pertemuan bilateral dengan Xi Jinping dan Presiden Rusia, Vladimir Putin secara terpisah. Penarikan diri Amerika Serikat dari perjanjian nuklir serta ancaman sanksi yang diberikan kepada Iran tentunya termasuk dalam pembahasan pertemuan tersebut. (Tempo.co, 10 Juni 2018)